

**PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TERHADAP PENAGIHAN DENDA KETERLAMBATAN ATAS
PENYELESAIAN PEKERJAAN KEPADA PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI YANG PAILIT**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**



FALAHDIKA RAKASATUTYA, S.H.
NIM 2120119002

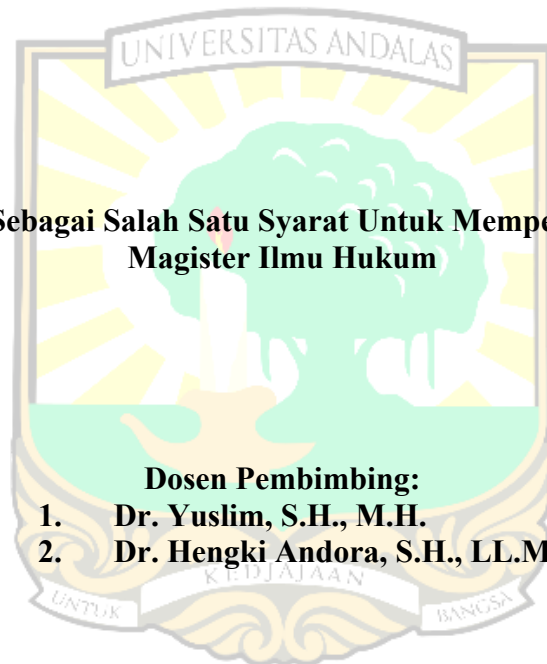
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TERHADAP PENAGIHAN DENDA KETERLAMBATAN ATAS
PENYELESAIAN PEKERJAAN KEPADA PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI YANG PAILIT**

TESIS

FALAHDIKA RAKASATUTYA, S.H.
NIM. 2120119002

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Yuslim, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TERHADAP PENAGIHAN DENDA KETERLAMBATAN ATAS
PENYELESAIAN PEKERJAAN KEPADA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
YANG PAILIT**

Oleh: Falahdika Rakasatutya (2120119002)

ABSTRAK

Sifat pekerjaan konstruksi yang kompleks menyebabkan hampir semua pekerjaan konstruksi berpotensi menyimpangi isi kontrak salah satunya karena mengalami keterlambatan pekerjaan. Dalam kontrak terdapat klausul mengenai akibat hukum keterlambatan pekerjaan bagi Penyedia Jasa yaitu pengenaan sanksi denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan. Pengenaan sanksi denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan dalam praktiknya beberapa kali mengalami kendala penagihan kepada Penyedia Jasa yang telah diputus pailit. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia yang belum mengatur mengenai kedudukan piutang negara dalam kepailitan. Akibat dari belum adanya pengaturan tersebut, maka PPK sebagai wakil negara dalam proses kepailitan tersebut diposisikan sebagai kreditor konkuren. Posisi PPK sebagai kreditor konkuren menyebabkan hak pembayaran piutang negara dari Debitor berupa denda keterlambatan didapatkan setelah tanggung jawab pembayaran utang kepada Kreditor preferen. Mekanisme pembayaran utang tersebut menyebabkan perolehan piutang cukup memakan waktu, serta nominal yang diperoleh tidak sesuai dengan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang dikenakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban PPK atas kendala penagihan denda keterlambatan, kedudukan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan dalam hal terjadi pailit, serta perlindungan hukum bagi PPK atas kendala penagihan denda keterlambatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian: Pertama, untuk menentukan batasan pertanggungjawaban PPK terkait dengan penagihan denda keterlambatan, perlu terlebih dahulu ditentukan penyebab munculnya kendala penagihan. Apabila terbukti bahwa kendala disebabkan karena penyalahgunaan wewenang oleh PPK, maka ia bertanggungjawab secara pribadi dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun apabila terbukti bahwa kendala bukan disebabkan karena kesalahannya maka seharusnya ia bertanggungjawab secara jabatan dan dapat dikenakan sanksi administrasi. Kedua, Mengingat bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai denda keterlambatan, maka urutan pembayarannya disetarakan dengan pembayaran utang terhadap kreditor konkuren. Ketiga, perlindungan hukum preventif bagi PPK diperoleh dari klausula dalam kontrak konstruksi serta mekanisme pencocokan piutang dalam kepailitan. Perlindungan hukum represif bagi PPK diperoleh dengan pengajuan upaya hukum kepailitan melalui permohonan kasasi atau peninjauan kasasi terhadap putusan permohonan pernyataan pailit.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Pekerjaan Konstruksi, Denda Keterlambatan, Kepailitan*

The Accountability of the Contracting Authority for the Collection of Penalty Fines for Delayed Completion from Bankrupt Construction Service Providers.

By: Falahdika Rakasatutya (2120119002)

ABSTRACT

The complexity of construction projects often leads to potential deviations from the contract terms, including project delays. Contracts usually include clauses regarding the legal consequences of project delays for the Service Provider, such as the imposition of penalty fines for delayed completion. However, the enforcement of penalty fines for project delays has encountered challenges in the case of bankrupt Service Providers undergoing debt settlement. These challenges are primarily due to the bankruptcy laws in Indonesia, which do not specifically regulate the position of state receivables in bankruptcy proceedings. As a result, the Contracting Authority (PPK), as the representative of the state in the bankruptcy process, is positioned as a concurrent creditor. The position of the Contracting Authority as a concurrent creditor leads to the payment rights of state receivables, in the form of delayed penalties, being obtained after the responsibility of paying debts to preferred creditors. This debt payment mechanism causes delays in the collection of receivables and the amount received does not correspond to the imposed penalties for project delays. This research aims to analyze the accountability of the Contracting Authority for the challenges in collecting penalty fines for delays, the position of penalty fines for project delays in the event of bankruptcy, and the legal protection for the Contracting Authority regarding the challenges in collecting penalty fines for delays. This research adopts a normative and descriptive approach, utilizing a statute approach to legal provisions. The research findings are as follows: first, to determine the extent of the Contracting Authority's accountability concerning the collection of penalty fines for delays, it is necessary to identify the causes of the challenges in collection. If it is proven that the challenges were caused by abuse of authority by the Contracting Authority, they will be personally held responsible and may face criminal sanctions. However, if it is proven that the challenges were not caused by their wrongdoing, they should be held accountable in their official capacity and may face administrative sanctions. Second, Since there is no specific legislation governing penalty fines for delays, their order of payment is aligned with the payment of debts to concurrent creditors. Third, The Contracting Authority obtains preventive legal protection through clauses in the construction contract and the mechanism of matching receivables in bankruptcy. Repressive legal protection for the Contracting Authority is obtained through filing bankruptcy legal actions, such as a cassation petition or a review of cassation against the bankruptcy declaration decision.

Key Words: *Accountability, Construction Projects, Delay Penalties, Bankruptcy*